

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kamboja merupakan negara terakhir yang masuk menjadi anggota ASEAN. Keanggotaan Kamboja ini melengkapi harapan para pendiri ASEAN untuk menyatukan sepuluh negara di Asia Tenggara. Harapan tersebut tidaklah berlebihan mengingat kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat potensial dan strategis. Dengan masuknya Kamboja ini kawasan Asia Tenggara menjadi lebih kuat dalam menghadapi persaingannya dengan organisasi-organisasi regional lainnya serta terhadap tantangan globalisasi.

Sebelum masuk menjadi anggota ASEAN, Kamboja merupakan negara yang menutup diri dari dunia luar. Kebijakan ini menambah daftar keterpurukan Kamboja yang banyak mengalami konflik serta keadaan politik dalam negeri Kamboja yang juga tidak stabil. Dimana keadaan ini yang akhirnya mengakibatkan negara tersebut mengalami kehancuran di berbagai segi kehidupan kurang lebih selama dua dekade.

Dalam hubungannya dengan masyarakat internasional, Kamboja pernah mengalami beberapa konflik dengan negara tetangganya yang berlatar belakang politik. Situasi ini juga dialami Kamboja dengan ASEAN yang merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Konflik dan ketegangan yang terjadi dilatarbelakangi sikap politik Hun Sen yang arogan. Dalam pernyataannya, Hun Sen tidak menginginkan bergabung

ASEAN sedangkan sebelumnya Kamboja berkeinginan menjadi

C. Latar Belakang Masalah

Perubahan-perubahan dalam sistem internasional merupakan suatu fenomena yang kompleks yang biasanya berlaku dalam bentuk yang saling terkait satu dengan yang lain. Dalam hal ini setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan internasional akan menimbulkan reaksi dalam sistem tersebut. Untuk tetap dapat eksis dalam lingkungan internasional yang dinamis tersebut suatu negara harus dapat menentukan alternatif kebijakan luar negrinya agar tetap dapat bertahan dalam segala kondisi yang mungkin terjadi. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa masing-masing negara mempunyai kekuatan dan kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan nasional suatu negara merupakan unsur yang sangat vital bagi suatu negara. Salah satu kepentingan tersebut yaitu kepentingan untuk tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup negaranya. Masalah mengenai bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup ini merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Kamboja.

Ditinjau dari segi geografis Kamboja terletak berbatasan dengan tiga negara tetangganya, yaitu di sebelah Timur dan Timur Laut berbatasan dengan Vietnam, di sebelah Barat berbatasan dengan Thailand, sedangkan di sebelah Utara berbatasan dengan Thailand dan Laos. Sepanjang wilayah Selatan dan Barat laut, Kamboja dilingkupi oleh Teluk Thailand.¹Pada tahun 1960-an, nama Kamboja cukup harum di dunia ditambah lagi kemasyuran Angkor Wat yang merupakan tujuan wisata populer di Asia pada saat itu. f

merupakan negeri yang ramah sehingga karena keramahannya tersebut Kamboja sempat dijuluki sebagai “The Smiling Country” atau “The Gentle Land of Smiling People”. Tetapi, kesan seperti ini akhirnya ternodai akibat pertikaian internal maupun eksternal Kamboja yang tak ubahnya sebagai sebuah ladang pembantaian “The Killing Field” berjuta-juta orang Kamboja.²

Apabila melihat latar belakang sejarahnya, Kamboja yang merdeka dari Perancis pada tahun 1953 ini menjadi negara yang tidak pernah lepas dari konflik internal dan juga konflik eksternal. Perang saudara, perebutan kekuasaan (kudeta) menjadi bagian dalam kehidupan perpolitikan Kamboja. Sedangkan, ketegangan dengan negara tetangganya pernah juga mewarnai hubungan luar negeri Kamboja, diantaranya ketegangan dengan Thailand dan Vietnam. Disamping masalah politik yang memanas, Kamboja juga diliputi permasalahan sosio ekonomi yang diakibatkan oleh permasalahan politik.

Konflik perebutan kekuasaan (kudeta) dimulai dari masa Kamboja di bawah kepemimpinan Pangeran Norodom Sihanouk yang kemudian digulingkan oleh Lon Nol. Lon Nol kemudian memimpin Kamboja dengan menggandeng Pol Pot yang kemudian mencampakkannya. Pemerintah Kamboja berhasil dikuasai Pol Pot yang bergerak satu jalur dengan Khieu Shampin. Selanjutnya pemerintahan ini berhasil digulingkan oleh Heng Samrin – Hun Sen yang memperoleh dukungan Uni Soviet-Vietnam. Pada kepemimpinan Heng Samrin ini dukungan Vietnam dan juga Uni Soviet

mengalir, hal ini menyebabkan usaha yang dilakukan Khmer Merah selalu dapat digagalkan. Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Hun Sen.

Berakhirnya perang dingin tidak saja berpengaruh secara global, tetapi juga berdampak besar terhadap kawasan Asia Tenggara. Penghentian bantuan Uni Soviet terhadap Vietnam menyebabkan negeri ini terpaksa menarik tentaranya dari Kamboja sejak akhir tahun 1989. Berkurangnya dukungan terhadap Hun Sen ini memperlemah posisinya, tetapi tidak memperlemah Hun Sen dalam ideologinya. Di lain pihak, RRC juga menyetop bantuan kepada kelompok Khmer Merah sedangkan Thailand menutup pintu perbatasannya yang selama bertahun-tahun dimanfaatkan untuk jalur perdagangan dan pemasokan senjata kepada kelompok gerilya ini.

Penarikan diri pelaku internasional ini menyebabkan konflik Kamboja kehilangan dimensi eksternalnya dan bergeser kepada pertikaian internal yang—pada mulanya diperkirakan— akan lebih mudah diselesaikan. Masalah Kamboja tidak lagi merupakan konflik regional tetapi sudah menjadi konflik lokal. Namun demikian, dunia internasional sangat menyayangkan konflik dalam negeri Kamboja yang berlarut-larut ini, termasuk ASEAN yang berupaya turut serta membantu terciptanya perdamaian. Dalam upaya damai selanjutnya disetujui lah perjanjian damai Paris pada bulan Oktober 1991.

Diawali dengan pemerintahan sementara PBB (UNTAC) yang diikuti kemudian dengan pemilu pada bulan Mei 1993 yang diawasi organisasi internasional, terbentuklah pemerintah yang dipimpin oleh

Menteri yaitu Ranariddh Hun Sen. Dimana pangeran Norodom

sebagai Perdana Menteri I sedangkan Hun Sen sebagai Perdana Menteri II. Posisi perdana menteri ini terjadi karena Hun Sen menolak hasil pemilu yang menyatakan partai FUNCINPEC pimpinan Pangeran Norodom Ranariddh lebih unggul. Maka untuk meredam konflik dan menjaga stabilitas damai bagi Kamboja, Pangeran Norodom Sihanouk menetapkan kepemimpinan berdasarkan posisi di atas. Akan tetapi, perdamaian di Kamboja tidak berumur panjang. Bulan Juli 1997 karena alasan kekhawatiran terhadap ancaman keseimbangan kekuatan dalam kepemimpinan dwitunggal Kamboja, Hun Sen menyingkirkan Ranariddh dan kawan-kawannya dari arena percaturan politik Kamboja.³ Untuk selanjutnya kepemimpinan Kamboja dikuasai oleh Hun Sen.

Dalam kepemimpinannya, Hun Sen berupaya meredam konflik dalam negeri yang masih memanas dan meningkatkan hubungan terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dimana saat itu Kamboja merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang mengupayakan menjadi anggota ASEAN. Sebagai permulaannya, Kamboja menjadi observer di dalam ASEAN pada tahun 1995. Namun, tindakan Hun Sen melawan Ranariddh mendapat kecaman dari dunia internasional termasuk ASEAN yang pada akhirnya menunda keanggotaan Kamboja dalam organisasi regional ini. Penundaan keanggotaan ini menimbulkan ketegangan antara Hun Sen dengan ASEAN karena Hun Sen telah menunjukkan kearogansiannya.⁴ Dalam pernyataannya, Hun Sen meyakini bahwa tanpa bergabung dengan ASEAN Kamboja tidak akan mati. Mengingat dalam proses perdamaian dan rekonstruksi

Jepang juga berperan besar. Hal ini juga yang membuat Hun Sen enggan bergabung dengan ASEAN. Sebelum Kamboja masuk ASEAN, Kamboja menjalin hubungan yang erat dengan Jepang. Hal ini terlihat dengan upaya Jepang yang besar dalam membantu proses pembangunan Kamboja. Inisiatif Jepang dalam pembangunan ekonomi Kamboja berawal sejak konferensi internasional mengenai Kamboja di Tokyo, 4 – 5 Juni 1990 yang mendorong Jepang membantu pendanaan penyelesaian masalah Kamboja. Pangeran Sihanouk dan Hun Sen ikut dalam pertemuan penting tersebut. Jepang selama ini memberikan bantuan dana kepada Kamboja melalui ODA Jepang.⁵ Jumlah keseluruhan bantuan Jepang sampai tahun 1995 adalah 274,44 juta dolar AS. Tapi bagaimanapun juga pernyataan Hun Sen tersebut tidak lazim dalam wacana diplomasi. Di samping itu, penolakan Hun Sen terhadap tawaran ASEAN tidak begitu berdampak negatif terhadap perkembangan perkembangan ASEAN, tetapi justru lebih merugikan kepentingan Kamboja sendiri. Kamboja akan kembali mengulang sejarahnya sebagai sebuah negara agraris yang kecil dan miskin, terkucilkan dari perkembangan dunia. Di sisi lain Hun Sen makin mengukuhkan kedudukan di dalam negeri sementara Ranariddh mencoba menggalang dukungan internasional yang tampaknya tidak begitu banyak membantu.

Mulai pertengahan tahun 1997 krisis moneter melanda Asia Timur dan Asia Tenggara dan pada tahun berikutnya, Kamboja melakukan pemilihan umum 26 Juli 1998. Sebanyak 5,3 juta penduduk (97 % dari

berhak memilih) mendaftar dan 90 % dari mereka ikut pemilihan umum. Ada 39 partai yang memperebutkan 122 kursi di parlemen (*National Assembly*). CPP (*Cambodian People's Party*) memenangkan 67 kursi, diikuti oleh dua partai oposisi yaitu FUNCINPEC yang dipimpin Ranariddh 43 kursi dan partai Sam Rainsy 15 kursi. Kedua partai yang belakangan ini menolak hasil pemilihan tersebut, mereka menuduh CPP melakukan intimidasi dan kecurangan.⁶ Terlepas dari berbagai kekurangannya, Hun Sen telah berhasil memenangkannya.

Perjuangan Hun Sen dalam membangun kembali Kamboja menjadikannya salah satu tokoh politik Kamboja yang menentukan. Ditengah berbagai konflik dan keterpurukan politik, ekonomi, serta sosial, Kamboja merupakan negara yang sedang mengalami masa peralihan. Dimana terdapat tujuh hal utama yang menjadi harapan ke arah yang lebih baik. Harapan tersebut yaitu; pertama, dari perang dan konflik menuju ke arah perdamaian; kedua, pengurangan kemiskinan penduduk; ketiga, dari pemerintah yang semula menerapkan kebijakan isolasi menjadi kebijakan yang mengutamakan persatuan (*integration*); keempat, dari negara yang lemah menjadi negara yang kuat; kelima, dari masyarakat yang semula tertutup menjadi masyarakat yang terbuka terhadap dunia luar; keenam, menuju ekonomi pasar bebas; dan ketujuh, perencanaan jangka pendek menjadi perencanaan strategis jangka panjang.⁷

⁶ *ibid.*, hal. 2.

⁷ Kao Kim Hourn, *Cambodia – From Crisis To Promise: Building the Future*, The Asia Foundation, 2008, hal. 6.

Akan tetapi, selama ini pembangunan ekonomi Kamboja sangat tergantung pada peningkatan kualitas infrastruktur mengingat bahwa kondisinya selama ini relatif terabaikan dan investasinya relatif rendah. Sehingga masalah ekonomi yang dihadapi Kamboja masih berat. Budaya politik masih kurang mendukung reformasi ekonomi dan pembangunan. Kamboja sangat tergantung kepada bantuan luar negeri. Apabila bantuan dari luar negeri ini terhenti atau terganggu, rehabilitasi ekonomi akan terganggu. Ketergantungan ini memberikan kesan bahwa pembangunan di Kamboja “terlalu dipercayakan” pada ahli-ahli dan donor asing termasuk ratusan LSM (NGO) dengan keterlibatan minimal dari pemerintah Kamboja sendiri.⁸

Dalam perkembangannya, Kamboja membuka hubungannya kembali dengan ASEAN. Hubungan yang sempat putus tahun 1997 ini mulai direalisasikan kembali dengan diselenggarakannya *Jakarta Informal Meeting* (JIM) ketiga pada bulan September 1998 dimana pada saat itu juga Hun Sen telah menjadi pemimpin Kamboja.

Jakarta Informal Meeting (JIM) merupakan agenda pertemuan yang diprakarsai Indonesia untuk membantu meredam dan menyelesaikan konflik Kamboja. Pada tanggal 25-28 Juli 1988 bertempat di Bogor diselenggarakan JIM pertama yang menghasilkan 9 kesepakatan bersama.⁹ Menyusul kemudian penyelenggaraan JIM kedua pada tanggal 19-21 1989 di Jakarta yang secara umum memuat 3 hal penting, yaitu penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dalam konteks penyelesaian politik yang komprehensif dan kesej

⁸ Mubyarto, *Kemiskinan di Vietnam, Laos, dan Kamboja*, Kantor Menko Ekuin, Jakarta, 1994, hal. 24.

⁹ Mubyarto, *Kemiskinan di Vietnam, Laos, dan Kamboja*, Kantor Menko Ekuin, Jakarta, 1994, hal. 24.

terulangnya praktek-praktek *genocide*, penghentian intervensi asing, serta tercapainya pemufakatan bahwa penyelesaian masalah Kamboja harus membantu kearah perdamaian stabil dan kerjasama Asia Tenggara.¹⁰ Setelah dalam sidang AMM yang berlangsung di Hanoi, 30 April 1999, Kamboja resmi menjadi anggota ASEAN.

Keanggotaan Kamboja dalam forum ASEAN ini tentu saja memberikan peluang dan keuntungan yang besar bagi pencapaian kepentingan nasionalnya. Namun, setiap peluang dan keuntungan memiliki resiko yang akan dihadapi Kamboja sebagai anggota ASEAN.

ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) sendiri merupakan kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Pada awal pembentukannya terdiri dari lima anggota Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Organisasi ini dibentuk melalui deklarasi Bangkok 1967. Terbentuknya ASEAN merupakan babak baru dalam kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang semula diwarnai konflik dan perselisihan. Sebagai bentuk kerjasama regional ASEAN telah memainkan peranan penting dalam menggalang solidaritas dan kerjasama ekonomi, politik, dan budaya diantara negara-negara anggotanya. Masuknya Kamboja menjadi anggota ASEAN semakin memperkuat kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang mempunyai masa depan.

yang telah merdeka tahun 1953. Pada akhir tahun 1950-an telah terjadi kematian bayi yang sangat tinggi yaitu di atas 50%. Disentri, malaria, patek, tuberkolosa, trachoma, berbagai macam penyakit kulit, dan penyakit parasitic merupakan hal biasa diderita oleh penduduk. Dan pada tahun 1960-an gizi yang tidak mencukupi, kondisi kebersihan yang sangat buruk, miskinnya praktek ilmu kesehatan, dan kekurangan perawatan kedokteran menjadi satu memberikan angka harapan hidup penduduk Kamboja hanya berusia sekitar empat puluh enam tahun. Akibat dari perang yang dahsyat dan kebijakan dari Khmer banyak dokter terbaik Eropa terbunuh atau terbang meninggalkan Kamboja. Karena pasokan obat-obatan modern terbatas maka menggunakan obat tradisional dari tanam-tanaman.

Beberapa indikasi di atas menunjukkan kondisi yang suram terhadap perhatian kesehatan di Kamboja. Badan Pembangunan Internasional memperkirakan kematian bayi pada 96 per 1000 kelahiran hidup tahun 2002, dan kematian ibu melahirkan sekitar 5 per 1000, serta hanya sepertiga kelahiran yang bisa ditangani oleh pekerja medis.

- Kesehatan masyarakat

Berdasarkan kepercayaan tradisional masyarakat Kamboja, penyakit mungkin disebabkan karena beberapa alasan spiritual yang mendasar. Roh jahat atau "hawa jahat" dipercaya menyebabkan beberapa penyakit dan dapat dikeluarkan dari tubuh orang yang sakit oleh orang terlatih, yang mungkin adalah dukun-dukun tradisional --biku, biku senior, tabib ra'--

ramuan tradisional, penyembuhan dengan cara tradisional diantaranya dengan melakukan *scraping* kulit dengan menggunakan uang logam, cincin, atau melakukan hal-hal kecil lainnya seperti dengan menyiram atau menyemprot tubuh orang yang sakit, kemudian berdoa.

Kegiatan kebersihan di desa di Kamboja masih sering dianggap primitif atau kuno. Persediaan air merupakan masalah yang utama. Sungai dan air terjun sumber utama untuk minum dan memasak. Sumber air ini juga digunakan masyarakat untuk mandi, mencuci pakaian, dan untuk tempat membuang sampah. Kekurangan tempat membuang kotoran merupakan keadaan di sebagian besar lingkungan desa dan tepi kota. Sebaliknya, kondisi yang bersih di wilayah kota besar seperti Phnom Penh, Batdambang, dan Kampong Cham banyak diperbaiki melebihi kondisi di desa. Pada tahun 1970-an, Phnom Penh mempunyai tiga tempat penyaringan air bersih yang cukup memadai untuk masyarakat, tetapi tidak cukup tersedia pasokannya manakala penduduk kota mengalami peningkatan yang cukup berarti pada pertengahan tahun 1970-an. Kota mempunyai pengumpulan sampah tetap, dan kotoran biasanya dibuang di septic tank.

Kondisi kesehatan di Kamboja menjadi krisis pertama pada waktu Kamboja merdeka pada tahun 1953. Beberapa tenaga medis Perancis kembali ke negaranya dan warga Kamboja terlatih menggantikan posisi mereka. Untuk mengoreksi masalah pertama ini, pemerintah mendirikan sekolah kedokteran dan sekolah keperawatan yaitu Fakultas Kedokteran Kerajaan

(Fakultas ini kemudian menjadi Fakultas Kedokteran, Fakultas

Fakultas Ilmu Kedokteran di tahun 1972, dan kemungkinan dibuka kembali pada tahun 1980).

Sekolah untuk pelatihan perawat dan bidan dioperasikan pada tahun 1970. Lembaga ini juga melatih para perantara atau perwakilan bidang kebersihan yang menerima pelatihan kesehatan selama empat tahun dengan penekanan pada soal kebersihan dan pada pengobatan pencegahan penyakit. Perwakilan ini menyediakan pelayanan kesehatan untuk daerah yang tidak mempunyai dokter dan klinik.

Kamboja tidak pernah mempunyai jumlah rumah sakit dan klinik yang memadai. Pada tahun 1930 hanya terdapat 450 kasur yang disediakan oleh rumah sakit di Phnom Penh. Baru kemudian pada tahun 1953, sebanyak 122 unit kesehatan masyarakat didirikan dan langsung beroperasi di Kamboja. Dan antara tahun 1955 sampai 1970 banyak mengalami perbaikan yang diselenggarakan oleh pihak kerajaan Kamboja.

Pada akhir tahun 1987, pemerintah di Phnom Penh tidak menyebarkan informasi mengenai penularan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS/HIV virus) di Kamboja. Tambahan pula, daftar penderita penyakit yang umum di Kamboja, seperti dilaporkan oleh lembaga internasional, tidak menyebutkan sarcoma karposi dan pneumo-cystic pneumonia (PCP), komplikasi yang paling umum disebabkan oleh virus HIV. Resiko penduduk Kamboja tertular oleh penyebaran virus HIV disebabkan melalui dua sumber. Kemungkinan besar karena pengaruh im

AIDS di tahun 1987. Dan kemungkinan kecil resiko penularan berasal dari para wisatawan yang datang ke Kamboja. Tetap tertutupnya Kamboja dan akses bagi orang asing yang masuk ke Kamboja (terkecuali bagi orang Vietnam, Soviet, dan Eropa Timur) adalah batas untuk sebagian kecil sarjana dan untuk anggota organisasi palang merah internasional.

- Program kesejahteraan

Abad kedua belas pada masa Raja Jayawarman VII merupakan bukti permulaan sistem kesejahteraan masyarakat di Kamboja. Jayawarman membangun rumah peristirahatan bagi masyarakat sepanjang jalan-jalan, menyalurkan beras bagi yang membutuhkan, dan melarang para pegawai pemungut pajak memungut uang pada orang yang lemah dan dipelihara.

Pada perkembangannya beberapa organisasi kesejahteraan didirikan di Kamboja di bawah rejim Sihanouk. Tahun 1949 sebuah Asosiasi Bantuan Bersama Nasional dibangun untuk menggalang dana, makanan, dan pakaian bagi yang membutuhkan. Sedangkan pada waktu di bawah pemerintah PRK, pengembangan pelayanan masyarakat pada tingkat daerah menunjukkan adanya kelambanan

B. Kebijakan Kamboja Menjadi Anggota ASEAN

Seperti seorang individu yang hidup, membutuhkan individu lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan hidupnya. Begitu juga sebuah negara memerlukan negara lain untuk mencapai nasionalnya serta mempertahankan kelangsungan hidup negaranya.

upaya membangun negara yang porak poranda akibat perang dan konflik berkepanjangan, Kamboja mulai membuka diri dengan dunia internasional terutama dengan negara dalam satu kawasan Asia Tenggara. Pada kepemimpinan Sihanouk, Kamboja pernah menerapkan kebijakan isolasi. Kebijakan ini justru menambah kondisi Kamboja semakin parah. Oleh karena itu, Kamboja menerapkan kebijakan baru yang mendukung pembangunan negara seribu kuil itu.

Tiga faktor telah memberi masukan bagi perubahan dalam kebijakan luar negeri Kamboja.²³ Pertama karena perubahan lingkungan eksternal. Berakhirnya Perang Dingin membuka keuntungan yang cukup banyak tidak hanya untuk wilayah tetapi lebih penting lagi untuk Kamboja. Berakhirnya Perang Dingin berarti suatu *de-escalation* pertikaian Kamboja yang berlarut-larut dan berakhirnya perang ideologi tidak hanya antara faksi-faksi Kamboja tapi juga diantara anggota ASEAN, di satu sisi, dan negara-negara Indocina Kamboja, Laos, dan Vietnam, di sisi lain.

Faktor kedua adalah perubahan lingkungan internal Kamboja telah meningkatnya keterbukaan politik di dalam negeri, dampak positif dari operasi perdamaian PBB yang menciptakan suatu lingkungan yang lebih kondusif, dan pemilu 1993 yang telah membawa tentang pandangan politik baru. Hal ini merupakan era baru bagi Kamboja. Kamboja menjadi lebih stabil dan lebih damai menuju rekonsiliasi nasional, semangat kekuatan berbagi, dan melembagakan proses demokrasi.

Faktor ketiga adalah reaksi para pemimpin Kamboja terhadap kegagalan kebijakan luar negeri Kamboja di masa lalu, khususnya kebijakan Khmer Republik dan Demokratik Kampuchea. Para pemimpin Kamboja prihatin dengan isolasi Kamboja di kawasan dan masyarakat internasional. Pada hakekatnya, ketiga faktor tersebut memberikan kekuatan perubahan di dalam kebijakan luar negeri Kamboja.

Sebagai latar belakang, Kamboja mulai untuk memeriksa kembali kerangka kerja kebijakan luar negerinya dan untuk membangun strategi kebijakan luar negeri, daftar langkah pilihan untuk sebuah hal baru dan berubahnya lingkungan politik di Kamboja. Dalam daftar kebijakan luar negeri, terdapat beberapa pilihan bagi Kamboja untuk benar-benar dipertimbangkan. Untuk sebagian besar, Kamboja kekurangan pengalaman, sumber daya, dan kemampuan kebijakan luar negerinya. Tetapi, dalam periode paska konflik, Kamboja mempunyai lebih banyak pilihan yang dapat mengarahkan kebijakan luar negeri Kamboja.

Opsi kebijakan luar negeri pertama, Kamboja mempertahankan *status quo*, yang sebenarnya melanjutkan kebijakan isolasi. Masyarakat yang mempertimbangkan menjadi pendukung atau mereka yang cenderung untuk mendukung perubahan kecil atau tanpa perubahan sama sekali di dalam partai politik besar kembali memberlakukan opsi ini walaupun berdampak negatif. Mereka berpendapat bahwa Kamboja belum siap memilah kebijakan negara karena masih adanya silang pendapat. Mereka benar.

menginginkan Kamboja merubah kebijakannya, khususnya dalam hubungan dengan ASEAN.

Pilihan kedua dari kebijakan luar negeri Kamboja adalah mengambil sikap *wait-and-see*. Sikap ini merupakan suatu pendekatan yang hati-hati untuk melihat bagaimana koalisi pemerintahan Kamboja pertama berkembang dan bagaimana situasi politik dalam kawasan akan lebih jauh memberikan ketidaktentuan politik pasca perang dingin. Pendekatan *wait-and-see* akan memberi Kamboja lebih banyak waktu untuk berkembang. Mereka yang mendukung opsi kebijakan luar negeri ini antara lain Sam Rainsy dan Son Sann. Mereka tidak menginginkan resiko yang melapisi konsekuensi kebijakan akan menjadi sesuatu yang salah.

Opsi ketiga adalah mengangkat pendekatan normalisasi dan membuka hubungan dengan negara-negara lain. Pendekatan ini akan menormalisasi hubungan Kamboja dengan negara lain khususnya dengan negara tetangga satu kawasan. Pilihan kebijakan ini hakekatnya mengakhiri isolasi Kamboja tapi menghambat permintaan integrasi Kamboja ke dalam masyarakat internasional dan kawasan.

Opsi kebijakan luar negeri keempat adalah untuk mengakhiri kebijakan isolasi Kamboja dan untuk sepenuhnya menyatukan diri ke dalam kawasan dan dunia. Para pemimpin Kamboja berpendapat bahwa Kamboja secara efektif hanya mempunyai dua pilihan dalam kebijakan luar negeri mereka, melanjutkan isolasi atau mengambil kebijakan integrasi. Sebei

isolasi sebagai opsi sama sekali. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, hanya ada satu kebijakan luar negeri yang dapat terus berjalan bagi Kamboja, khususnya di dalam kerja sama ASEAN dan untuk membuat kebijakan ini sebagai dasar kebijakan keluar negeri Kamboja.

C. Rasionalitas Keanggotaan Kamboja dalam Forum ASEAN

Sebagai negara kecil dan lemah yang muncul dari dekade perang dan kehancuran, Kamboja tidak akan mampu melanjutkan kebijakan negara di masa lalu yaitu isolasi dan menggantungkan pada diplomasi bilateral seorang diri. Beberapa rasionalitas bagi Kamboja untuk menerima keanggotaannya ke dalam ASEAN, yaitu *strategic rationale*, *economic rationale*, *diplomatic rationale*, *prestige rationale*, dan *legitimacy rationale*.²⁴

1. *strategic rationale*

Strategic rationale ini disebut oleh semua anggota baru ASEAN (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) sebagai rasionalitas utama untuk masuk menjadi anggota organisasi regional ini. Dalam kasus Kamboja, bergabung dengan ASEAN merupakan maksimalisasi dari opsi kebijakan luar negeri Kamboja pasca Perang Dingin dengan meninggalkan kebijakan isolasi ke arah integrasi ASEAN. Melalui keanggotaan dalam ASEAN Kamboja dapat memainkan peran aktif lebih banyak dalam persoalan regional dan internasional menyangkut tujuan dan penguatan kepentingan strategis Kamboja.

Selanjutnya, masuknya Kamboja ke dalam ASEAN untuk kepentingan strategis Kamboja dalam kepastian bahwa keamanan nasional Kamboja akan menjamin lebih lanjut dengan organisasi regional ini. Amitav Acharya mengatakan, *strategic rationale* keanggotaan Kamboja dalam ASEAN dan apa yang dapat diharapkan dari menjadi bagian organisasi regional ini adalah dengan bergabung dengan ASEAN akan membawa kepentingan keamanan eksternal Kamboja. Hal ini akan membuka banyak prospek masa depan terhadap campur tangan dalam negeri oleh beberapa negara tetangga, seperti Vietnam dan Thailand, dengan demikian meletakkan satu perhatian keamanan Kamboja paling serius. Sebagai anggota ASEAN, baik Vietnam maupun Kamboja akan memegang keras prinsip tidak ikut campur tangan dalam persoalan internal masing-masing negara. Dengan bergabung dengan ASEAN, Kamboja akan menjadi mitra yang sejajar dengan negara-negara tetangganya.

2. *economic rationale*

Banyak negara yang masuk menerima keanggotaan dalam organisasi regional seperti ASEAN sering tidak selalu dimotivasi oleh kepentingan politik dan strategis saja tetapi oleh *economic rationale*. Dalam kasus anggota baru ASEAN, mereka tidak diterima ke dalam kelompok regional ini untuk alasan politik dan strategis semata. Mereka juga diharuskan berpartisipasi dalam kerjasama ekonomi, ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang merupakan zona perdagangan ekonomi ASEAN. Seperti anggota baru ASEAN lainnya (Laos, Myanmar, dan Vietnam), Kamboja mempunyai kepentingan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

rasionalitas ekonomi Kamboja dalam penggabungan ASEAN adalah untuk fokus dalam memacu pembangunan ekonomi melalui peningkatan perdagangan, investasi, pariwisata, dan pertanian. Secara khusus, Kamboja berharap untuk mencapai keuntungan ekonomi dari masuknya Kamboja ke dalam ASEAN dan partisipasi Kamboja dalam AFTA. Enam faktor bagi keuntungan ekonomi Kamboja dari ASEAN yaitu; pertama, ASEAN sebagai suatu faktor peningkat kepercayaan para investor di Kamboja; kedua, ASEAN menetapkan skala ekonomi dengan menggabungkan tingkat penduduk sekitar setengah juta; ketiga, ASEAN sebagai kelompok pertumbuhan ekonomi cepat dan suatu kemajuan pesat untuk ekonomi regional; empat, ASEAN sebagai sebuah pintu gerbang ekonomi terpenting menuju ekonomi global; lima, ASEAN sebagai suatu latihan dasar bagi keanggotaan Kamboja dalam *World Trade Organization (WTO)*; dan enam, ASEAN sebagai suatu katalisator untuk merangsang perubahan ekonomi dalam negeri Kamboja. Untuk beberapa tingkat, Kamboja mengakui kenyataan bahwa bantuan luar negeri akan berkurang dan hal ini diperlukan untuk menghindari dari ketergantungan bantuan dalam jangka waktu yang lama.

Selain itu, untuk mempercepat globalisasi dan peningkatan ketergantungan ekonomi, seperti anggota baru lainnya, Kamboja mempunyai pilihan sedikit tetapi untuk menyatukan ke dalam ASEAN dan AFTA supaya membangun ekonomi Kamboja dan mempersiapkan diri sendiri untuk

3. *diplomatic rationale*

Untuk beberapa tingkat, ASEAN adalah suatu “*diplomatic club*” regional, dimana para menteri luar negeri (pada *ASEAN Ministerial Meeting* atau AMM) dan para pejabat senior (pada *Senior Official Meeting* atau SOM) ASEAN menyelenggarakan pertemuan reguler. Untuk ASEAN, diplomasi, negosiasi, dan strategi ini merupakan kunci instrumen kebijakan luar negeri untuk anggota ASEAN dalam hubungan regional dan internasional. Semua anggota baru ASEAN tidak mempunyai kebijakan luar negeri aktif pada masa lalu. Mengikuti berakhirnya Perang Dingin, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (negara CLMV) memerlukan ASEAN untuk secara diplomatik meminta kekuatan besar dan mengejar hubungan internasional lebih efektif.

Bagi Kamboja, ASEAN merupakan dasar penting kebijakan luar negerinya. Dalam hubungan diplomatik, masuknya Kamboja ke dalam ASEAN memberikan kerangka kerja baru bagi perjanjian Kamboja dengan negara-negara lainnya, khususnya dengan kekuatan-kekuatan paling besar. Amitav Acharya menyatakan bahwa *Post-Ministerial Consultations* tahunan ASEAN (ASEAN-PMC) dengan sejumlah negara-negara besar, meliputi Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan India akan memberikan Kamboja dengan keuntungan untuk belajar lebih tentang kebijakan-kebijakan negara tersebut dan menerima dukungan mereka untuk pembangunan Kamboja dan kemakmuran. Sebagai negara kecil dengan sumber daya kurang, ini akan tidak mungkin bagi Kamboja untuk membangun setiap hubungan den

pakai untuk konsultasi dan kerjasama. Dengan cara yang sama, Kamboja dapat menggunakan kekuatan kolektif dan kemampuan tawar-menawar ASEAN untuk mengejar kepentingan keamanannya dalam Forum Regional ASEAN, yang termasuk semua pemain besar mempengaruhi keamanan regional dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik.

4. *prestige rationale*

Bagi Kamboja, *prestige rationale*, menyatukan keinginan untuk “terlihat memperhatikan warganya” dan “terlihat cinta damai” dan menambah beberapa penghormatan, mungkin perlu beberapa tingkat. Tetapi, pada dasarnya, *rationale prestige* merupakan suatu proses membangun percaya diri dan kepercayaan, membangun citra bagus, dan perpindahan kejiwaan positif. Kebanyakan dari anggota baru ASEAN, dalam kasus Kamboja, telah menderita akibat citra negatif internasional dan kehilangan kepercayaan mereka untuk dekade perang, konflik, dan isolasi. Dalam hal ini, *prestige* adalah elemen penting dalam mempengaruhi keputusan para pemimpin anggota baru dalam mengamankan penerimaan mereka ke dalam kelompok regional. Oleh karena itu, keanggotaan dalam ASEAN dapat membantu meningkatkan tumbuhnya kepercayaan, rekonsiliasi politik, dan perbaikan citra positif untuk anggota-anggota baru, khususnya Kamboja.

5. *legitimacy rationale*

Berakhirnya Perang Dingin, kebanyakan anggota baru ASEAN nampak sangat membutuhkan pengesahan dan pengakuan

dalam kasus Kamboja. sebagai anggota baru memerlukan pengesahan dalam pandangan masyarakat sendiri dan pandangan masyarakat dunia. Kamboja telah menderita akibat isolasi internasional selama beberapa tahun, hal ini sangat membutuhkan pengakuan baik dari masyarakat regional maupun internasional. Oleh karena itu, masuknya Kamboja ke dalam ASEAN merupakan bagian penting dalam mencari pengesahan dan pengakuan pasca Perang Dingin dan pasca era UNTAC.

Pada intinya, kelima rasionalitas di atas memberikan pengaruh bagi para pemimpin Kamboja menginginkan keanggotaan ASEAN dengan penuh semangat sejak pembentukan pemerintahan Kamboja yang pertama hasil pemilu 1993 sampai Kamboja pada akhirnya masuk ke dalam kelompok regional ini pada 30 April 1999.

D. Masalah dan Tantangan Kamboja dalam Forum ASEAN

Pada tingkat internasional, perubahan hubungan antara negara besar dapat menyebabkan ketidakpastian terutama menyangkut perimbangan kekuatan dan kehadiran mereka di Asia Pasifik. Selanjutnya kecenderungan dalam sistem ekonomi global yang mengarah, di satu pihak, kepada peningkatan perdagangan dan di lain pihak, praktik perdagangan itu sendiri mengandung konflik dan ketegangan.

Pada tingkat regional, sumber konflik baru muncul, isu bilateral makin penting. Selanjutnya karena ASEAN kian berkembang maka...

kekurangannya makin kelihatan. Sebab itu dibutuhkan evaluasi keadaan baru secara mendasar terhadap struktur dan proses organisasi.

Bagi Kamboja hambatan jangka pendek dan menengah adalah tingkat sosial, ekonomi, SDM dan pembangunan infrastruktur yang rendah, ditambah dengan sejumlah kendala hukum dan institusi. Kendala di atas membatasi kapasitas mereka untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yang disertai dengan pemerataan, serta kemampuannya untuk menyumbang dan memanfaatkan proses kerjasama regional.

Bagi Kamboja, sebagai akibat dari perang, kelangkaan SDM trampil terus mengganggu proses rekonsiliasi nasional dan rekonstruksi serta untuk menghadapi AFTA. Karena keterbatasan *basis revenue*, perhatian khusus harus diberikan karena mereka kehilangan sebagian pendapatan akibat liberalisasi perdagangan ini. Dalam hal ini terdapat rekomendasi yang ditujukan untuk Kamboja, sebagai berikut:²⁵

a. penting dan segera

Kamboja, lumpuh oleh kekurangan SDM yang trampil dan kompeten. Solusinya untuk jangka panjang adalah program pendidikan dan pelatihan, tetapi untuk jangka pendek ini menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan ASEAN. Secara tradisional elit Kamboja dapat berbahasa Perancis. Dengan bertambah pentingnya bahasa Inggris di ASEAN dan dengan dijadikannya Inggris sebagai bahasa komunikasi dal:

resmi ASEAN, pejabat Kamboja, tidak hanya didorong untuk belajar bahasa Inggris tetapi juga memperkuat lembaga pemerintah mereka yang berkaitan dengan ASEAN dan AFTA. Lima program diusulkan:

1. Pelatihan bahasa Inggris.
 2. Program penataran yang berhubungan dengan AFTA.
 3. Studi tentang dampak AFTA.
 4. Penyebaran informasi tentang ASEAN kepada masyarakat Kamboja.
 5. Dokumentasi dan penerjemahan dokumen yang berhubungan dengan ASEAN dan AFTA ke dalam bahasa Khmer.
 6. Pengembangan kapasitas kelembagaan.
- b. jangka menengah dan panjang
1. Bantuan teknis untuk pendirian *ASEAN Research Center* di Kamboja yang melakukan riset dan pengajaran tentang negara-negara ASEAN.
 2. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa Kamboja dalam bidang manajemen, ekonomi, teknik, lingkungan dan kesehatan dan lain-lain pada institut di salah satu negara ASEAN.
 3. Bantuan dalam pemberian beasiswa bagi orang Kamboja, dalam bidang pengajaran dan administrasi pendidikan.
 4. Bantuan dalam penediaan ahli untuk melakukan

- a). studi tentang transportasi Kamboja (termasuk penggunaan sungai Mekong sebagai jalan air) dan kebutuhan telekomunikasi.
- b). studi tentang pariwisata di Kamboja, serta pelatihan bagi pengembangan industri pariwisata dari negara ASEAN lainnya.
- c). studi tentang pengalaman ASEAN dalam pemberantasan kemiskinan.
- d). studi tentang potensi sumber daya alam di Kamboja.
- e). studi tentang wilayah yang ditanam bom di Kamboja.

Untuk jangka panjang, prioritas kerjasama sebaiknya dalam bidang:

1. Pengembangan mekanisme pasar bebas untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi Kamboja.
2. Pengembangan SDM
3. Pembangunan infrastruktur, peran swasta agar ditingkatkan.
4. Kerjasama dalam bidang pertanian, tenaga listrik dan agrobisnis di mana Kamboja punya potensi keunggulan komparatif.

Selain itu aspek yang khususnya dikembangkan adalah bagi Kamboja, sebaiknya diambil langkah-langkah menjaga dan meningkatkan warisan budaya yang kaya dan melindungi dari kepentingan komersial.

Rekomendasi untuk Kamboja ini memnerikan kesempatan lebih banyak dalam memnerikan pembangunan yang lebih ke

E. Prospek Keanggotaan Kamboja dalam Forum ASEAN

Berakhirnya Perang Dingin yang diikuti dengan redanya ketegangan ideologis secara global memiliki dampak positif terhadap kawasan Asia Tenggara. Implikasi tersebut adalah munculnya suasana yang kondusif bagi kerjasama yang lebih luas dan lebih dalam bagi negara-negara Asia Tenggara. Situasi yang kondusif itu telah membuka peluang dan tantangan bagi Asia Tenggara. Peluang itu berarti bahwa wilayah ini menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia. Kerja sama regional diperluas dengan masuknya Vietnam, Laos, Myanmar, dan terakhir Kamboja. Kerja sama regional juga diperdalam dengan percepatan AFTA.

Pada waktu yang sama wilayah ini menghadapi tantangan. Pertama, ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan hubungan di antara kekuatan besar (*major powers*), kebangkitan kekuatan regional baru di Asia, dan konflik dalam sistem ekonomi global. Kedua, munculnya sumber potensi konflik dan ketegangan, dimulainya kembali perlombaan senjata, persoalan akses sumber daya alam, sampai kepada aliran migrasi tidak sah, narkoba dan barang lintas batas.

Perluasan ASEAN menimbulkan beberapa pertanyaan tentang masa depan jangka menengah dan jangka panjang organisasi ini. Pertama, bagaimana ASEAN secara serempak dapat memperluas dan memperdalam kerjasamanya dengan tingkat kepuasan yang sama terhadap kedua aspek itu. Kedua, bagaimana ASEAN dapat mempertinggi kinerja organisas-

meningkatkan rasa identitas regional di antara anggota baru dan la

bagaimana di satu pihak negara ASEAN yang relatif maju ekonomi dan teknologinya dapat meningkatkan kedua bidang tersebut dalam memenuhi kepentingan nasional dan menghadapi kompetisi global, di lain pihak agar dinamika ini tidak memperlebar jurang dengan tetangganya yang kurang maju.

Pada sisi lain, seiring dengan usaha integrasi kawasan tersebut ke dalam wadah kerjasama ASEAN terjadi perkembangan di dalam negeri negara-negara Indocina itu sendiri. Meskipun (kecuali Kamboja) masih menganut sistem partai tunggal dan mengikuti aliran politik sosialis, mereka telah memulai membuka ekonominya menjadi ekonomi pasar. Adaptasi terhadap kecenderungan sistem ekonomi politik global tersebut telah memberikan kesempatan kepada negara-negara tersebut untuk masuk ke dalam tata ekonomi regional dan global yang mengikuti logika ekonomi liberal.

Dinamika internal kebijaksanaan ekonomi negara-negara Indocina secara mendasar menunjukkan bahwa mereka secara bersungguh-sungguh ingin bergabung di dalam suatu *international society* yang memiliki kecenderungannya sendiri ke arah pola yang lebih plural secara ekonomi. Perkembangan ekonomi negara-negara Indocina pada tahun 1990-an mengalami pertumbuhan yang berarti, tidak seperti ketika masih bergabung dalam sistem ekonomi sosialis yang begitu tergantung kepada negara patron baik Uni Soviet maupun Cina. Kini penanaman modal asing secara terbuka telah memberikan kesempatan kepada negara-negara tersebut untuk

Kamboja yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa memulai program restrukturisasi ekonomi setelah terselenggara pemilu tahun 1993. Dengan bantuan *International Committee for the Recontraction of Cambodia (ICORC)* pembangunan ini diharapkan dapat berjalan lancar. Perluasan ASEAN dengan Kamboja merupakan interaksi dua arah dan akan mempengaruhi persepatan gerak ASEAN seperti saat ini. Perluasan ASEAN dengan Kamboja memiliki dampak keamanan tersendiri baik positif maupun negatif. Dari sisi positif untuk intramural Asia Tenggara telah menurunkan derajat *enmity* sebagai konsekuensi kesepakatan bergabung dengan ASEAN.

F. Sekilas ASEAN

Deklarasi Bangkok merupakan akar tonggak dari sejarah terbentuknya ASA (sekarang ASEAN), dimana perjanjian dilakukan oleh tiga negara kawasan Asia Tenggara pada tanggal 13 Juli 1961. Negara tersebut adalah Malaysia, Filipina dan Thailand. Berlanjut disusul dengan Indonesia dan Singapura, yang akhirnya dilakukan perundingan untuk memperluas fungsi ASA dan mengganti nama baru sampai akhirnya ditemukan nama ASEAN (*Association of South East Asian Nations*). Melalui Deklarasi ASEAN dan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani tanggal 8 Agustus 1967 dengan wakil-wakil antara lain : Adam Malik dari Indonesia, Narsisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S Rajaratnam dari Singapura dan

ASEAN terbentuk karena adanya keinginan bersama di kalangan negara-negara Asia Tenggara yang merasa yakin akan perlunya usaha untuk lebih memperkuat ikatan-ikatan solidaritas regional dan kerjasama yang ada. Adanya hasrat untuk membentuk suatu landasan yang teguh untuk meningkatkan kerjasama regional di Asia Tenggara dan didasarkan atas jiwa persamaan dan persekutuan yang menuju sumbangan ke arah terwujudnya perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara.

Regionalisasi Asia Tenggara yang diprakarsai lima negara ini sangat berpola pada diplomasi musyawarah dan sikap bahwa “masalah Asia diselesaikan menurut cara Asia”. Thanat Khoman menggambarkan hasrat untuk membentuk ASEAN. Hasrat itu²⁶

Berpangkal pada pertimbangan-pertimbangan praktis dan realistis, yaitu pada kenyataan bahwa negara-negara Asia Tenggara pada umumnya lemah dan kecil. Mungkin dalam beberapa hal mereka memiliki sumber daya yang patut diperhitungkan, tetapi potensi ekonomi dan militer negara-negara itu kurang mengedepankan. Secara terpisah, pengaruh mereka terhadap peristiwa-peristiwa dunia kecil. Secara politis, mereka dibalkanisasikan oleh pemerintah kolonial untuk jangka waktu yang lama dan lebih diarahkan ke pusat-pusat metropolitan negara-negara penjajah daripada ke negara-negara tetangga mereka. Kompartementalisasi kolonial ini telah membuat mereka asing dan menutup diri terhadap setiap kemungkinan untuk mengembangkan hubungan dan kerja sama regional. Untuk mengoreksi keadaan ini, kesendirian dan isolasi yang lama itu harus diatasi dan suatu perasaan baru tentang solidaritas dan persahabatan kawasan harus ditumbuhkan yang membawa negara-negara itu ke suatu keterikatan dan kerjasama regional. Jika tujuan ini tercapai, maka kelemahan dan kemandulan mereka masing-masing secara bertahap akan digantikan dengan kekuatan tepadu yang lebih besar. Suara mereka akan lebih didengar dan kemampuan mereka akan diperhitungkan dalam forum internasional.

Pertimbangan dan pemikiran ini terungkap dalam sasaran-sasaran yang dicanangkan para pendiri ASEAN dalam Deklarasi ASEAN. Sasaran pertama, pendirian ASEAN seperti tercantum dalam Deklarasi Bangkok ialah mendamaikan pertikaian intraregional yang saat itu tengah marak di Asia Tenggara, seperti pertikaian territorial dan batas negara, konflik etnis dan permusuhan yang memunculkan gerakan separatis, pemberontakan komunis di dalam negeri mereka masing-masing, prasangka agama dan ketakutan negara kecil terhadap negara yang lebih besar yang saat itu dipertajam oleh konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia.

Karena keadaan semacam itu mengganggu proses pembangunan bangsa, maka sasaran kedua ditujukan untuk mengelola masalah-masalah itu, dan menciptakan suatu tata regional Asia Tenggara yang bersumber pada sistem sosial-ekonomi masing-masing negara dan *status quo* territorialnya.

Kedua sasaran itu hendak dicapai melalui sasaran yang ketiga, yaitu memacu pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya berkaitan erat dengan perdamaian dan stabilitas. Keterkaitan itu diungkapkan berulang kali, baik dalam pidato maupun dalam kesepakatan yang mereka tandatangani sejak pembentukan ASEAN.

Anggota ASEAN yang semula hanya terdiri dari lima negara bertambah pada tanggal 8 Januari 1984 setelah Brunai Darussalam masuk menjadi anggota yang ke enam. Kemudian setelah tiga dasawarsa ASEAN semakin mengembangkan sayapnya dengan bergabungnya Vi

tanggal 27 Juli 1995 diwakili Laos dan Myanmar, dan terakhir Va

tanggal 30 April 1999. Bagi negara-negara di Asia Tenggara apabila kohesi dan solidaritas yang kuat diantara kesepuluh negara Asia Tenggara tersebut dapat ditempa, akan dapat memberikan stabilitas yang diperlukan untuk mengejar tujuan nasional, pembangunan dan kemajuan ekonomi masing-masing negara.

ASEAN sebagai kumpulan negara-negara yang mempunyai potensi besar dan kuat. Sedangkan Kamboja sendiri mengingat besarnya sumber daya alam dan jumlah penduduknya, maka dengan dinyatakannya Kamboja menjadi kesatuan dari asosiasi tersebut menciptakan fenomena baru dan keuntungan lebih bagi penciptaan kawasan bebas damai di Asia Tenggara dan wilayah